

**IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI
E-WARUNG DI KELURAHAN SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO
KOTA SURABAYA**

Ika Surya Kharismawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: ikasurya133@gmail.com

Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya SEBESAR Rp. 110.000,- melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warung /pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Pelaksana program ini adalah Menteri Sosial RI. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Dengan menggunakan enam indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program. Karakteristik agen pelaksana masih ada yang bersikap tidak ramah sehingga tidak menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga tidak mendukung program bantuan. Disposisi implementor terjadi beberapa sikap pelaksana yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sehingga dapat menghambat jalannya program ini. Dengan ini saran yang dapat diberikan adalah Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas terkait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC. Perlu adanya evaluasi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perlu adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan

Kata Kunci: Impelementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Sidosermo

Abstract

Food Aid Non-Cash is food aid from the government given to KPM monthly OF Rp. 110.000, - through the mechanism of Electronic account to be used only to buy food in the E-shop / traders of foodstuffs which cooperate with the new joint Bank. The purpose of this research is to describe Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. The executor of this program is the Minister of Social Affairs. This research is a descriptive research with qualitative approach. Data collected through interview techniques and documentation. This research focuses on Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. Using the six indicators of Size and Purpose of Policies, Resources, Characteristics of Implementing Agent, Inter-Organization Communication, Social Conditions, Economics and Politics and Implementor Disposition. The results show that the size and policy objectives have not been reached maximally because there are problems with EDC machines that may inhibit the distribution of aid. The human, financial and funding resources available are sufficient to support the implementation of the program. Characteristics of implementing agents are still being unfriendly and not applying a good public service attitude. The

social, economic condition of the people whose knowledge is lacking so as not to support the aid program. The disposition of the implementor happens to some executor's attitude which is not responsible for the duties so that it can hamper the program. With this advice can be given is Need a good coordination by the implementer so that there will be no unvalidity of data. It needs a quick response by the relevant officers in dealing with EDC machine facility problem. There needs to be an evaluation related to an implementor who can not implement a good public service attitude. There needs to be more assistance on social conditions that are less supportive with the holding of the program of Non-Cash Food Assistance (BPNT). There needs to be more strict transparency and supervision to avoid irregularities.

Keywords: Impelementation, Non-Cash Food Assistance, Sidosermo

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (www.worldbank.org). Kepedulian pemerintah tersebut secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.”

Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ E-Warung yang bekerjasama dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penerima Manfaat Bantuan Pangan

Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur di E-Warung. apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan.

Kecamatan Wonocolo menjadi pilihan pertama untuk didirikannya E-Warung ini, tepatnya di Kelurahan Sidosermo. Didirikannya E-Warung sekaligus terlaksananya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kelurahan ini dipilih secara acak oleh Menteri Sosial yaitu Khofifah Indar Parawansa. Hal ini dilakukan agar dapat mengukur keberhasilan program ini, sehingga Menteri Sosial hanya memilih satu kelurahan ini di Surabaya.

E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dibuka langsung pada tanggal 6 Agustus 2016 oleh Menteri Sosial yaitu Khofifah Indar Parawansa. Kelurahan Sidosermo terpilih untuk didirikan E-Warung ini pertama kali di Surabaya. Setelah dibukanya E-Warung ini masyarakat mulai melakukan pengambilan yang didampingi oleh para pendamping. E-Warung yang berada di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Sidosermo III/8. E-Warung ini terpilih karena sudah memenuhi syarat yaitu tanah tidak bersengketa, pemilik rumah bersedia untuk didirikan E-Warung, serta terjangkau oleh jaringan internet. E-Warung ini dikelola Ketua dan anggota yang berjumlah sepuluh orang sesuai dengan kriteria dan persyaratan pada pasal 4 ayat 1 Permensos RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kriteria Pembentukan E-Warung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk meninjau Implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peneliti menggunakan teori Van Metter dan Van Carl Horn yang meliputi 6 faktor yang berpengaruh dalam implementasi program yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Bertitik tolak dengan latar belakang diatas, maka penyusun mengambil penelitian dengan judul **“Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) elalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”**

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori Van Metter dan Van Carl Horn yang meliputi 6 faktor yang berpengaruh dalam implemementasi program yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2012) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan khususnya Pemerintah Kota Surabaya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan wonocolo Kota Surabaya yang ada sejak tahun 2016. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung yang dibuat oleh Menteri Sosial yaitu Khofifah Indar Parawansa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait dengan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Apabila standar, tujuan dan sasaran kebijakan tidak tercapai akan terjadi multi interpretasi dan

mudah terjadi konflik diantara para agen implementor, sehingga dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ada salah satu tujuan yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM belum terlaksana karena ada masalah yang terjadi pada mesin EDC sehingga menyebabkan pada salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terealisasi yaitu meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. karena dengan terjadinya maslah pada mesin EDC menyebabkan ketidak efektifan penyaluran

2. Sumber Daya

Didalam implementasi kebijakan diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, sumber daya financial dan sumber daya waktu tentunya sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sumber daya manusia yang paling peting didalam implementasi kebijakan. Dibutuhkan sumber daya yang kompeten didalam pelaksanaan program agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial menyebutkan bahwa banyak aktor yang terkait dalam program ini. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Tentunya keberhasilan pelaksana program tidak terlepas dari aktor-aktor lingkup desa seperti Kepala Desa. Aktor pelaksana yang terdiri dari pendamping desa, Koordinator di kelurahan dan lurah dan masyarakat setempat yang ikut membantu dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Peran aktor pelaksana tersebut

sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program ini juga yang menentukan sukses tidaknya adalah pemerintah kelurahan, karena program ini diterapkan di kelurahan.

Sumber daya finansial atau dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementrian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 100.000,-/bulan. untuk sumber daya dana sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sumber daya waktu untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sudah efektif. Karena uang yang tersalurkan setiap bulan tidak ada kendala.

Sumber daya fasilitas sendiri mengalami kendala yaitu pada mesin EDC yang sering terjadi gangguan, sehingga proses implementasi terganggu. Dan dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, untuk karakteristik yang ada pada aktor pelaksana Kelurahan adalah aktor pelaksana yang tegas, disiplin, baik dan ramah kepada setiap masyarakat. Untuk karakteristik yang ideal dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Untuk mengetahui peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara pada beberapa KPM untuk mengetahui bagaimana karakteristik pada masing-masing aktor pelaksana di tingkat Kelurahan. Hasilnya adalah para aktor pelaksana mulai dari pak Lurah, Pendamping, Koordinator Kelurahan dan Ketua E-Warung. Semua aktor dikelurahan mulai dari pak Lurah, pendamping dan Ketua E-Warung dari hasil lapangan dan wawancara sudah memenuhi standar yaitu masing-masing aktor memiliki sifat yang sudah tertera dalam UU No. 25 Tahun 2009. Salah satunya berbunyi pelaksanaan pelayanan publik harus berperilaku sabbun dan ramah. Hanya saja ada satu aktor pelaksana yaitu koordinator kelurahan yang tidak memenuhi

standar. Karena tidak memiliki sifat yang dimiliki aktor lain.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya di Kelurahan Sidosermo sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Hanya saja terdapat seorang pelaksana yang tidak ramah dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak nyaman atas sikap pelaksana tersebut.

Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Justru yang dilakukan salah satu implementor adalah hal yang menyimpang. Hal ini tidak dapat melakukan salah satu poin pada disposisi implementor respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin EDC menjadi keluhan masyarakat.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Didalam pelaksanaan program Bantuna Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya pada awal implementasi program tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat desa maupun pusat. Karena sebelumnya pelaksanaan program dari Kementrian Sosial sudah memberikan sosialisasi baik standar, tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Dimana hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Sidosermo agar masyarakat mengetahui secara rinci isi dari program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) memlaui E-Warung.

Untuk penyampaian sosialisasi pada KPM dilakukan dikelurahan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan dibantu oleh para pendamping. Pada saat ini semua KPM dikumpulkan di kelurahan dan dijelaskan secara rinci mengenai standar, tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melaui E-Warung ini. Tidak hanya itu, pendaping juga melakukan sosialisasi secara rutin pada saat transaksi

program Bantuan agar masyarakat paham. Sehingga komunikasi antar organisasi terjalin dengan baik

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Jika dilihat dari segi sosial masyarakat sangat merespon adanya program, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Karena dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu dalam proses pengadaan barang di E-Warung. Masyarakat ikut membantu mengangkat dan menata barang-barang yang dibeli oleh para pihak pelaksana. Hanya saja karena keadaan masyarakat ada beberapa yang buta huruf dan lansia. Sehingga tidak dapat menggunakan ATM. Hal ini menjadi thambatan karena program ini menggunakan ATM sebagai sarana transaksi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan juga menjelaskan bagaimana implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Tujuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan apa alasannya kebijakan itu dibuat. Akan tetapi Masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja jika bantuan tersebut mendapatkan bantuan berupa bahan pangan. Sedangkan pada tujuan sudah tertera bahwa ada beberapa tujuan pemerintah dalam program ini. Tujuan program Bantuan Pangan ini belum berjalan dengan semestinya karena ada salah satu tujuan yaitu meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.

Sumber daya merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kebijakan publik dan hal yang menjadi sangat krusial adalah sumber daya. Adapun sumber daya yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya manusia, financial dan waktu. Keberhasilan implementasi memerlukan keempat sumberdaya tersebut. Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Sumber daya manusia yang menjalankan program

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo yaitu Koordinator Kelurahan, Pendamping Desa serta masyarakat setempat. Sumber daya finansial atau dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementrian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 110.000,-/ bulan. Untuk sumber daya dana sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman pelaksanaan Bantauan Pangan Non Tunai (BPNT). Sumber daya waktu untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sudah efektif. Karena uang yang tersalurkan setiap bulan tidak ada kendala. Sumber daya fasilitas sendiri mengalami kendala yaitu pada mesin EDC yang sering terjadi gangguan, sehingga proses implementasi terganggu. Dan dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Komunikasi antar organisasi terdapat dua indikator, yaitu koordinasi dan komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Sehingga komunikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya oleh Kementrian Sosial, Dinas, Kelurahan dan kelompok sasaran sudah berjalan dengan baik.

Karakteristik agen pelaksana yang mendukung berjalannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah disiplin, ramah, bertanggung dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kedisiplinan pelaksana tercermin dari kesigapan dalam menjalankan program program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan tepat waktu. sikap ramah, bertanggung jawab dan jiwa soaial yang tinggi juga tercermin dalam jiwa aktor pelaksana dalam menjalankan program ini. Akan tetapi ada satu aktor yang tidak menerapkan sifat ramah dan sopan sesuai dengan sifat yang tertera dalam UU No. 25 Tahun 2009. Sehingga dapat menjadi hambatan dalam berjalannya program ini.

Kondisi Sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Karena keadaan sosial, ekonomi dan politik dapat mendukung bahkan sebaliknya. Di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya mengalami kelusitan. Untuk keadaan ekonomi warga Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya juga tidak mengalami masalah.

Disposisi implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Justru yang dilakukan salah satu implementor adalah hal yang menyimpang. Hal ini tidak dapat melakukan salah satu poin pada disposisi implementor respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin EDC menjadi keluhan masyarakat.

Saran

Dari hasil uraian tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dalam proses implementasinya menemui beberapa permasalahan maka perlu adanya beberapa hal yang perlu di diperbaiki. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti untuk peningkatan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data.

2. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas terkait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC.
3. Perlu adanya evaluasi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik.
4. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
5. Perlu adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing
- c. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warung KUBE.

www.wordlbank.org diakses pada 26 April 2017